

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku:

- Amirudin, Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Arief, Barda Nawawi, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Bakhri, Syaiful, 2009, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, Total Media, Yogyakarta
- Candra, Sapta, 2012, "Tindak Pidana Korupsi: Upaya Pencegahan dan Pemberantasan", *Hukum Pidana Dalam Perspektif*, Pustaka Larasan, Bali.
- Chazawi, Adami, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Chazawi, Adami, 2006, *Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana Edisi Revisi*, Media Nusa Creative, Malang
- Danil, Elwi, 2014, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hiariej, Eddy O.S., 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Ilyas, Amir, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Renggang Education Yogyakarta&PuKAP-Indonesia, Yogyakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Priyatno, Dwija, Muladi, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Premada Media Group, Jakarta.
- Remmelik, Jan, 2014, *Hukum Pidana komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Schaffmeister, D, N. Keizer, E.PH. Sutorius, 1995, *Hukum Pidana: Kumpulan Bahan Penataan Hukum Pidana Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia Belanda*, Liberty, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2014, *Pengertian Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.

Soesilo, R, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor.

Wijayanto, dan Ridwan Zachrie, 2009, *Korupsi Mengorupsi Indonesia Sebab, Akibat dan Prospek Pemberantasannya*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Yunara, Edi, 2012, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berikut Studi Kasus*, PT Citra Aditya, Bandung.

_____, 2006, *Memahami Untuk Membasmi: Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Komisi Pemberantasan Korupsi republik Indonesia, Jakarta.

2. Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140) Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134).

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154).

Undang-Undang Nomor 7 Drt 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran Negara Nomor 27 Tahun 1955)

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sebagaimana diganti dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2006

Peraturan Mahkamah Agung No 13 tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomo 2058)

Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 2041);

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia No. Per- 028/A/JA/10/2014 Tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana Dengan Subjek Hukum Korporasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1492);

3. Jurnal, Laporan dan Skripsi

Anindito, Lakso, “Lingkup Tindak Pidana Korupsi dan Pembuktian Kesalahan dalam Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia Inggris dan Prancis”, *Integritas*, Volume 3, No. 1, Maret 2017

Anugerah, 2016, “optimalisasi Pengembalian Pidana Uang Pengganti Terhadap Korporasi Dalam Perkara Tindak Pidana korupsi”, (Penulisan Hukum, Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hassanudin).

Hartono, Bambang, ”Analisis Pelaksanaan Pidana Ganti Kerugian (Denda) Dalam Tindak Pidana Korupsi”, *Keadilan Progresif*, Vol.2, No.1, Maret 2011.

Ibrahim, Aji Lukman, “Analisis Yuridis Terhadap Penjatuhan Pidana Tambahan Pencabutan Hak Memilih dan Dipilih Dalam Jabatan Publik Djoko Susilo”, *Supremasi Hukum*, Vol. 3, No. 1, Juni 2014.

Madusira, Muhammad Aras, 2011, “Eksekusi Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”, *Tesis*, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Santo, Paulus Aluk Fajar Dwi, “Tinjauan Subjek Hukum Korporasi Dan Formulasi Pertanggungjawaban Dalam Tindak Pidana”, *Humaniora*, Vol. 3, No. 2, Oktober 2012.

Sitanggang, Radius Emerson, 2016, “Penuntutan Dan Penjatuhan Pidana Terhadap Korporasi Yang Tidak Didakwa Dalam Surat Dakwaan dalam Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Hukum Postif Indonesia”, *Penulisan Hukum*, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.

Suhariyanto, Budi, 2017, “Urgensi Pidanaan Terhadap Pengendali Korporasi Yang Tidak Tercantum Dalam Kepengurusan Kajian Putusan Nomor 1081 K/PID.SUS/2014” , *Jurnal Yudisial*, Vol.10 No. 3, Desember 2017

Toruan, Henry Donald Lbn, “Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Korporasi”, *Rechtvinding*, Volume 3, Nomor 3, Desember 2014

4. Internet

Aritonang, Deytri Robekka, “Pidana Denda Tak Efektif Jerat Korporasi Korup”, <http://nasional.kompas.com/read/2013/07/30/1521321/Pidana.Denda.Tak.Efektif.Jerat.Korporasi.Korup>, pada tanggal 19 Mei 2017.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, “Penggunaan dan/atau”,

http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/petunjuk_praktis/638/Penggunaan%20Dan/atau, diakses pada tanggal 20 Desember 2017

Fajrian & Fajrian, “Petinggi Korporasi Yang Terjerat Kasus Korupsi”, <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20170120141941-23-187703/petinggi-korporasi-yang-terjerat-kasus-korupsi/>, diakses pada tanggal 15 Mei 2017.

Hukum Online, “daya paksa dan pembelaan terpaksa sebagai alasan penghapus pidana”, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt51bd53f7b6b00/daya-paksa-dan-pembelaan-terpaksa-sebagai-alasan-penghapus-pidana>, diakses pada tanggal 29 september 2017

Hukum Online, “Ini korporasi Pertama Yang Dijerat UU Tipikor”, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50feae76da8bf/ini-korporasi-pertama-yang-dijerat-uu-tipikor>, pada tanggal 19 Mei 2017.

Hukum Online, “Menjerat Korporasi Jahat: Lika-Liku Menarik Pertanggungjawaban Korporasi dalam Kasus Korupsi”, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5885f5667b8a1/lika-liku-menarik-pertanggungjawaban-korporasi-dalam-kasus-korupsi>, diakses pada tanggal 16 Mei 2017.

Hukum Online, “Penggunaan dan Penafsiran “dan/atau” dalam Peraturan Perundang-undangan”, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt51ed081b2b89d/penggunaan-dan-penafsiran-dan-atau-dalam-peraturan-perundang-undangan>, Hukum Online, diakses pada tanggal 20 Desember 2017

Hukum online, “Pidana Pokok dan Tambahan” <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl194/pidana-pokok-dan-tambahan>, diakses pada tanggal 25 September 2017

Institute Criminal For Justice Reform, “Putusan pembayaran uang pengganti oleh PT. DGI atau PT. KNE, Sejarah baru menghukum Korporasi dalam Kasus Korupsi”, <http://icjr.or.id/putusan-pembayaran-uang-pengganti-oleh-pt-dgi-atau-pt-kne-sejarah-baru-menghukum-korporasi-dalam-kasus-korupsi/>, diakses pada tanggal 13 Maret 2018

KBBI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/korup>, diakses pada tanggal 31 Juli 2017.

KBBI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/korupsi>, diakses pada tanggal 31 Juli 2017

Kbbi Daring, <https://kbbi.web.id/narasumber>, diakses pada tanggal 11 Oktober 2017

Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, “Perkara Bioremediasi Chevron, Terpidana herland bin Ompo Dan Ricksy Prematurey Mengajukan PK”, <http://www.kejari-jaksel.go.id/read/news/2014/11/28/679/perkara->

bioremediasi-chevron-terpidana-herland-bin-ompo-dan-ricksy-prematurity-mengajukan-pk, diakses pada tanggal 26 Desember 2017

Puspitasari, Maya Ayu, “Tersangka Korupsi Korporasi, PT DGI Titipkan 15 Miliar Ke KPK”, <https://nasional.tempo.co/read/news/2017/08/09/063898275/tersangka-korupsi-korporasi-pt-dgi-titipkan-rp-15-miliar-ke-kpk>, diakses pada tanggal 9 Agustus 2017

Saputra, Andi, ”Alasan Lengkap Mahkamah Agung Menolak PK Indar Atmanto”, <https://news.detik.com/berita/3085242/alasan-lengkap-ma-menolak-pk-indar-atmanto>, diakses pada tanggal 12 Januari 2018.

Setyawan, Feri Agus, “Terima fee Proyek, KPK Bidik Korporasi dalam Kasus e-KTP”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170721215902-12-229556/terima-fee-proyek-kpk-bidik-korporasi-dalam-kasus-e-ktp>, diakses pada tanggal 19 Desember 2017

Taylor, Gloria Safira “Singapura Selidiki Uang Tersembunyi Nazzarudin”, <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160616084232-12-138536/singapura-selidiki-uang-tersembunyi-nazaruddin/>, diakses pada tanggal 15 Mei 2017.

Tranparancy International Indonesia, “Corruption Perception index 2016: Terus Perkuat Integritas Sektor Publik, Dorong Integritas Bisnis Sektor Swasta”, <http://www.ti.or.id/index.php/publication/2017/01/25/corruption-perceptions-index-2016>, diakses pada tanggal 15 Mei 2017.